



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 563 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 64 TAHUN 2025
TENTANG PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI BANTUL
TAHUN 2025

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyesuaian kebutuhan regulasi di Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2025 tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Bantul Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 130);

6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati, Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan Rancangan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 60);
7. Keputusan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2025 tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Bantul Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 64 TAHUN 2025 TENTANG PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI BANTUL TAHUN 2025.
- KESATU : Mengubah atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2025 tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Bantul Tahun 2025 pada Lampirannya, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 Agustus 2025
BUPATI BANTUL,
ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 563 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 64 TAHUN 2025 TENTANG PERENCANAAN
PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI BANTUL TAHUN
2025

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI BANTUL TAHUN 2025

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
1	Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara Berprestasi	Perubahan pada Lampirannya berkaitan dengan perubahan atas pedoman penilaian dan kriteria verifikasi berkas usulan peserta oleh Sekretariat KPP dan perubahan atas kategori kejuaraan	Triwulan I	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	Tata Cara Penugasan dan Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas	Perubahan persyaratan pengangkatan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas	Triwulan I	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Penyesuaian dengan perolehan suara pemilu tahun 2024	Triwulan I	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	Kajian Risiko Bencana Daerah Tahun 2025-2029	a. definisi-definisi; b. potensi bencana; c. penyusun; d. sistematika; dan e. mekanisme evaluasi.	Triwulan I	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
5	Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029	a. definisi-definisi; b. tujuan penyusunan; c. bahan untuk menyusun; d. masa berlaku; e. penyusun dan pelaksana; f. sistematika; g. mekanisme pemantauan, evaluasi, dan peninjauan ulang; dan h. pendanaan	Triwulan I	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Rencana Kontingensi Bencana Tanah Longsor	a. definisi-definisi; b. maksud dan tujuan penyusunan; c. penyusun dan pelaksana; d. sistematika; e. posisi rencana kontingensi terhadap dokumen perencanaan lainnya; f. aktivasi rencana kontingensi; g. mekanisme pembentukan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana; h. uji rencana kontingensi; i. masa berlaku; j. mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengkajian ulang; dan k. pendanaan.	Triwulan I	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	Mekanisme Pemilihan dan Kriteria Anggota Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah	a. Pelaksanaan pemilihan b. masa dan tata cara kerja c. pelaporan proses pemilihan dan pelaporan hasil kerja unsur pengarah; dan d. pendanaan	Triwulan I	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Pedoman Teknis Penilaian Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sebagai acuan dalam penilaian evaluasi kinerja perangkat daerah	Triwulan I	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
9	Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah	Perubahan terhadap beberapa Pasal	Triwulan I	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
10	Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 158 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Surat Keterangan Penelitian, Kuliah Kerja Nyata, dan Praktik Kerja Lapangan	Sebagai pedoman pelaksanaan KKN di Kabupaten Bantul	Triwulan I	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
11	Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebersihan, Pertamanan dan Persampahan	mengatur mengenai ketentuan umum, kelembagaan, prosedur kerja, pengelompokan fungsi, pengelolaan sumberdaya manusia, dan ketentuan penutup	Triwulan I	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam
12	Tarif Pelayanan Air Minum Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari	a. Penggolongan Pelanggan b. Tarif Pelayanan Air Minum c. Prosedur Berlangganan	Triwulan I	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam
13	Rencana Kontinjensi Kesiapsiagaan dan Ketahanan Terhadap Wabah Penyakit Infeksi Emerging Patogen Respiratory Kabupaten Bantul	Sistem dan Kapasitas untuk Kewaspadaan dan Respon : Koordinasi Kedaruratan, Surveilans Kolaboratif, Perlindungan masyarakat, Respon Medis / Manajemen klinis	Triwulan I	Dinas Kesehatan
14	Percepatan penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Bantul	sistem penyelenggaraan pelayanan yang terintegrasi untuk ibu hamil dan produk kehamilan, meningkatkan mutu pelayanan serta melindungi pasien dari kelalaian dalam profesionalitas tenaga kesehatan	Triwulan I	Dinas Kesehatan
15	Hasil Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak dan Retribusi Jasa Usaha atas Penjualan Produksi Usaha Daerah	perubahan tarif terkait dengan penjualan produksi usaha daerah dan rumah pemotongan hewan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul	Triwulan I	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
16	Pedoman Pengelolaan Aduan Masyarakat	Tata cara layanan pengaduan dan Pelaporan di Kabupaten Bantul	Triwulan I	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
17	Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul	mengakomodir perubahan terkait dengan materi manajemen akses	Triwulan I	Dinas Komunikasi dan Informatika
18	Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi Tahun 2025-2027	a. Program dan kegiatan yang akan dilakukan di tahun 2025-2027 b. Peran stakeholder dalam pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang terwadai dalam tim c. Target dan output pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Triwulan I	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan
19	Rencana Aksi Daerah Penghapusan Merkuri	a. target; b. strategi; dan c. kegiatan.	Triwulan I	Dinas Lingkungan Hidup
20	Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung: a. Kebijakan kelengkapan administrasi yang belum tertuang dalam Perda; dan b. Sinkronisasi dengan peraturan pada Perangkat Daerah lain	Triwulan I	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
21	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan	a. Batasan Verifikator yang dilakukan oleh Carik; b. Pembentukan Tim PBJ dan TPK; c. Ketugasan TPK d. Penambahan Lampiran pada Kelengkapan SPJ;	Triwulan I	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
22	Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan	a. Ketugasan Tim PBJ; b. Batas Bawah untuk pembelian langsung; c. Proses serah terima pekerjaan; d. Ketugasan Verifikator dalam dokumen PBJ;	Triwulan I	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
23	Alokasi Dana Desa	a. Pembagian besaran ADD masing- masing kalurahan; b. Peruntukan penggunaan ADD; c. Cara Penghitungan ADD; d. Mekanisme Pencairan ADD;	Triwulan I	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
24	Dana Desa	a. Pembagian besaran Dana Desa masing-masing Kalurahan; b. Penggunaan Dana Desa; c. Mekanisme Pencairan dan pelaporan Dana Desa	Triwulan I	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
25	Bantuan Keuangan Khusus	Menyesuaikan peruntukan HOK untuk BPJS Ketenagakerjaan	Triwulan I	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
26	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	menyesuaikan peruntukan HOK untuk BPJS ketenagakerjaan	Triwulan I	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
27	Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan	menyesuaikan peruntukan HOK untuk BPJS ketenagakerjaan serta oenyesuaian ruang lingkup	Triwulan I	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
28	Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat	Materi, sebagian besar sama dg PERBUP sebelumnya, , merubah peruntukan HOK untuk BPJS ketenagakerjaan dan merubah peruntukan pergeseran pasukan	Triwulan I	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
29	Dana Insentif Kalurahan	Menyesuaikan dengan regulasi SAKIP Kalurahan	Triwulan I	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
30	Pedoman Standar Pelayanan Publik Kalurahan	Mengakomodir mengenai perumusan, penetapan, internalisasi, penerapan dan sosialisasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap standar pelayanan publik Pemerintahan Kalurahan	Triwulan I	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
31	Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah	Pedoman pengelolaan BOSDA	Triwulan I	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
32	Pedoman Pemberian Insentif Kepada Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pegawai Tidak Tetap, dan Pegawai Tetap Yayasan di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025	a. Maksud dan tujuan pemberian insentif b. Kriteria penerima insentif c. Pengajuan, pembayaran dan pertanggungjawaban d. Pengembalian insentif e. Pembinaan dan pengawasan insentif	Triwulan I	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
33	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perparkiran	a. pola Parkir pada Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan b. tata cara pelaksanaan sanksi administratif c. tata cara penambahan pembantu Juru Parkir d. tata cara permohonan izin e. tata cara tindakan penertiban dan pengenaan denda administratif f. mekanisme dan tata cara pembinaan dan pengawasan	Triwulan I	Dinas Perhubungan
34	Penyelenggaraan Program Boga Sehat	a. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana atau pengampu program Boga Sehat telah berubah nomenklaturnya; b. Dasar hukum yang termuat sebagian telah dicabut atau mengalami perubahan; c. Penggantian sasaran penerima manfaat; d. Penambahan detail pada mekanisme pelaksanaan, mekanisme pendataan, serta mekanisme penggantian dan/atau pemberhentian penerima manfaat; dan e. Penambahan peraturan terkait kualitas menu makanan Boga Sehat.	Triwulan I	Dinas Sosial
35	Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	a. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan b. Peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan c. Pendanaan	Triwulan I	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
36	Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2024 tentang Disiplin dan Pemberhentian Pamong Kalurahan	mengatur mengenai perubahan pengaturan terkait dengan jenis hukuman disiplin, mekanisme pengajuan rekomendasi pemberhentian Pamong Kalurahan dan mekanisme pemberhentian staf Kalurahan.	Triwulan I	Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul
37	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha	a. pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha b. tata cara pengenaan sanksi administratif c. pengelolaan pengaduan masyarakat d. pengembangan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS	Triwulan I	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
38	Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara	Perubahan pada Lampirannya berkaitan dengan identifikasi, penilaian, dan pemetaan talenta dilaksanakan melalui metode pengujian, pengukuran, dan/atau pemeringkatan	Triwulan II	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
39	Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	a. definisi-definisi; b. maksud dan tujuan penyusunan; c. penyusun dan pelaksana; d. sistematika; e. hubungan RPKB terhadap dokumen perencanaan lainnya, termasuk rencana kontingensi; f. masa berlaku; g. mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengkajian ulang; dan h. pendanaan.	Triwulan II	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
40	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2013 tentang Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Mekanisme pembentukan dan peran serta lembaga/organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan kesiapsiagaan dan peringatan dini	Triwulan II	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
41	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2015 tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	a. mekanisme dan tata cara kerja Pos Komando Penanganan Darurat, khususnya dalam hal penerimaan bantuan dari Lembaga Usaha b. pengawasan terhadap peran serta lembaga usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana c. penyampaian laporan pelaksanaan oleh lembaga usaha dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana	Triwulan II	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
42	Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	a. penambahan satuan pendidikan jenjang Taman Kanak-Kanak b. penyesuaian tugas dan fungsi satuan pendidikan jenjang Taman Kanak-Kanak	Triwulan II	Bagian Organisasi
43	Pengelolaan Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah	a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai Non ASN b. Prosedur Pengadaan Pegawai Non ASN c. Penilaian Kinerja Pegawai Non ASN d. Penghasilan Pegawai Non ASN e. Pengembangan Kompetensi Pegawai Non ASN f. Pemberian Penghargaan dan Hukuman Bagi Pegawai Non ASN g. Pemberian Cuti Bagi Pegawai Non ASN h. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja i. Pembinaan dan Pengawasan Pegawai Non ASN	Triwulan II	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
44	Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah	a. Struktur Anggaran BLUD b. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran d. Pelaksanaan Anggaran BLUD e. Pengelolaan Kas, Belanja, Persediaan dan Aset f. Pengelolaan Utang dan Piutang BLUD g. Pengelolaan Investasi BLUD h. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran i. Surplus dan Defisit BLUD j. Penyelesaian Kerugian k. Akuntansi dan Pelaporan	Triwulan II	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam
45	Petunjuk Teknis Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bantul	a. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan b. Prosedur pelayanan dan penerbitan dokumen kependudukan c. Pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting d. persyaratan dan mekanisme pelaporan e. sistem informasi pendukung layanan administrasi kependudukan	Triwulan II	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
46	Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul	a. Akses informasi dan dokumentasi publik b. Hak dan kewajiban c. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi d. Kelembagaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi e. Kelengkapan pengelola layanan informasi dan dokumentasi f. Klasifikasi informasi publik g. Mekanisme permohonan informasi dan dokumentasi h. Pembinaan dan pengendalian penataan layanan informasi dan dokumentasi i. Keberatan dan fasilitasi sengketa informasi	Triwulan II	Dinas Komunikasi dan Informatika
47	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi	a. Pendataan koperasi b. Tata cara pengajuan permohonan program Pemberdayaan Koperasi c. Tata cara pengenaan sanksi administratif bagi koperasi yang tidak melaksanakan kewajiban dan melakukan pelanggaran d. Petunjuk pelaksanaan pengawasan koperasi	Triwulan II	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan
48	Bagi Hasil Retribusi Daerah	a. Pembagian besaran BHR masing- masing kalurahan; b. Peruntukan penggunaan BHR; c. Cara Penghitungan BHR; d. Mekanisme Pencairan BHR;	Triwulan II	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
49	Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan	a. Perubahan maksimal pada nominal rupiah; b. Pengaturan dasar golongan II.a pada masa kerja golongan;	Triwulan II	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
50	Dana Kompensasi Pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk fasilitas Pemerintah Daerah	a. Pembagian Besaran masing-masing Kalurahan; b. Cara Penghitungan dana kompensasi; c. Mekanisme pencairan dana kompensasi	Triwulan II	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
51	Bagi Hasil Pajak Daerah	a. Pembagian besaran BHP masing- masing kalurahan; b. Peruntukan penggunaan BHP; c. Cara Penghitungan BHP; d. Mekanisme Pencairan BHR;	Triwulan II	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
52	Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 181 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusutan Arsip	a. Pemindahan Arsip b. Pemusnahan Arsip c. Penyerahan Arsip Statis	Triwulan II	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
53	Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	Triwulan II	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
54	Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul	a. Pengaturan Internal Korporasi (<i>Corporate By laws</i>) b. Pengaturan Internal Staf Medis (<i>Medical Staff By laws</i>) c. Pengaturan Internal Staf Keperawatan (<i>Nursing staf by law</i>)	Triwulan II	RSUD Panembahan Senopati
55	Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul	a. Pengusulan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi; b. Persyaratan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi; c. Pengangkatan dan Pemberhentian Kelompok Pakar atau Tim Ahli Kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi; d. Tugas Kelompok Pakar atau Tim Ahli Kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi; e. Pembayaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi; f. Pertanggungjawaban atas Pemberian Kompensasi.	Triwulan II	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
56	Koperasi Desa Merah Putih	Mengatur mengenai Definisi Koperasi Desa Merah Putih, Bentuk pemberdayaan dan perlindungan, Pembagian tugas antar stakeholder, Evaluasi, Pembentukan Satgas.	Triwulan II	
57	Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Dewan Kebudayaan	Mengatur mengenai unsur keanggotaan, hak, pemberhentian, dan pengaturan antar waktu Dewan Kebudayaan	Triwulan II	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
58	Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul	Kelembagaan dan mekanisme kerja TKPK Kabupaten dan Kapanewon	Triwulan III	Dinas Sosial
59	Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara	Pedoman mengenai sikap, tingkah laku dan perbuatan, tulisan dan ucapan Pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan Pegawai, bangsa, dan negara.	Triwulan III	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
60	Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bantul	Pedoman dalam proses mutasi atau perpindahan tugas dan/atau lokasi antar OPD dalam Pemerintah Kabupaten Bantul, mutasi atau perpindahan tugas dan/atau lokasi dari instansi pusat atau instansi daerah lain ke Pemerintah Kabupaten Bantul atau perpindahan tugas dan/atau lokasi dari Pemerintah Kabupaten Bantul ke instansi pusat atau instansi daerah lain.	Triwulan III	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
61	Pengadaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bantul	Pedoman dalam proses pengadaan ASN baik melalui seleksi CPNS maupun PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul	Triwulan III	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
62	Petunjuk Pelaksanaan Perda Penanggulangan Bencana	a. manajemen kedaruratan bencana untuk tahap siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan; b. kemudahan akses pendanaan, sumber daya, serta data dan informasi saat situasi darurat; c. mekanisme dan tata cara kerja Pos Komando Penanganan Darurat Bencana; dan d. tindakan yang dilakukan saat keadaan darurat.	Triwulan III	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
63	Rencana Kontingensi Banjir	a. definisi-definisi; b. maksud dan tujuan penyusunan; c. penyusun dan pelaksana; d. sistematika; e. posisi rencana kontingensi terhadap dokumen perencanaan lainnya; f. aktivasi rencana kontingensi; g. mekanisme pembentukan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana; h. uji rencana kontingensi; i. masa berlaku; j. mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengkajian ulang; dan k. pendanaan.	Triwulan III	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
64	Rencana Kontingensi Tsunami	a. definisi-definisi; b. maksud dan tujuan penyusunan; c. penyusun dan pelaksana; d. sistematika; e. posisi rencana kontingensi terhadap dokumen perencanaan lainnya; f. aktivasi rencana kontingensi; g. mekanisme pembentukan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana; h. uji rencana kontingensi; i. masa berlaku; j. mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengkajian ulang; dan k. pendanaan.	Triwulan III	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
65	Rencana Kontingensi Cuaca Ekstrem	a. definisi-definisi; b. maksud dan tujuan penyusunan; c. penyusun dan pelaksana; d. sistematika; e. posisi rencana kontingensi terhadap dokumen perencanaan lainnya; f. aktivasi rencana kontingensi; g. mekanisme pembentukan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana; h. uji rencana kontingensi; i. masa berlaku; j. mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengkajian ulang; dan k. pendanaan.	Triwulan III	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
66	Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	a. definisi-definisi; b. tujuan penyusunan; c. masa berlaku; d. penyusun dan pelaksana; e. sistematika; f. mekanisme pemantauan, evaluasi, dan peninjauan ulang; dan g. pendanaan.	Triwulan III	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
67	Kebijakan Akuntansi Dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan dalam pelaporan keuangan sehingga perlu dicabut dan diganti	Triwulan III	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
68	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026	a. perencanaan pembangunan daerah tahun 2026 b. pedoman penyusunan dokumen dan kebijakan tahun 2026 c. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026	Triwulan III	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
69	Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026	a. Perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Tahun 2026 b. Tindak lanjut penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026	Triwulan III	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
70	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025	a. Perubahan perencanaan pembangunan daerah tahun 2025 b. pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025	Triwulan III	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
71	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025	a. Perubahan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Tahun 2025 b. Tindak lanjut penyusunan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025	Triwulan III	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
72	Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	a. Pembentukan Forum CSR b. Alur pengajuan CSR c. Pelaporan CSR d. Ketentuan terkait dengan pelaksanaan CSR	Triwulan III	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
73	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sebagai acuan operasional bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman	Triwulan III	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
74	Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta di Kabupaten Bantul	Sebagai acuan operasional bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan warisan dunia sumbu filosofi di Kabupaten Bantul	Triwulan III	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
75	Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2035	a. tujuan dan sasaran GDPK b. Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Daerah	Triwulan III	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
76	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren	Pembentukan aturan turunan dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren	Triwulan III	Bagian Kesejahteraan Rakyat
77	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak	a. Ruang bermain ramah anak b. Sekolah ramah anak c. Tempat ibadah ramah anak	Triwulan III	Bagian Kesejahteraan Rakyat
78	Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Dengan Pihak Lain	a. Kerja Sama b. Mitra Kerja Sama c. Tahapan Kerja Sama d. Berakhirnya Kerja Sama	Triwulan III	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
79	Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	a. Perlu menambahkan tentang percepatan transformasi digital b. Perlu menambahkan pasal teknis tentang pembangunan dan pengembangan aplikasi, jaringan intra pemerintah, sistem penghubung layanan pemerintah, dan pusat data c. perlu menambahkan pasal yang mengatur lebih teknis tentang audit SPBE sesuai dengan Peraturan BSSN dan Peraturan BRIN d. perlu menambahkan pasal yang mengatur dengan lebih lengkap terkait arsitektur dan peta rencana SPBE	Triwulan III	Dinas Komunikasi dan Informatika
80	Grand Design Hilirisasi Ekonomi Melalui Koperasi	a. Petunjuk pelaksanaan hilirisasi ekonomi melalui koperasi b. Pembagian peran stakeholder untuk mencapai hilirisasi ekonomi melalui koperasi	Triwulan III	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan
81	Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Objek Retribusi Rumah Susun Sederhana Sewa	Perubahan terkait: 1. Perubahan pada denda Retribusi sewa, limbah dan sampah yang masih 2% akan dirubah menjadi 1%. 2. Penambahan terkait ketentuan yang mengatur tentang Penghapusan Piutang Retribusi. 3. Perubahan terkait Sanksi untuk keterlambatan retribusi kepada wajib retribusi.	Triwulan III	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
82	Batas Kalurahan Guwosari	a. Titik koordinat batas kalurahan; b. Batas kalurahan sesuai arah mata angin; c. Kode Desa; d. Jaminan terhadap hak atas tanah; e. Nama-nama dusun; f. Ketentuan peralihan	Triwulan III	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
83	Batas Kalurahan Sendangsari	a. Titik koordinat batas kalurahan; b. Batas kalurahan sesuai arah mata angin; c. Kode Desa; d. Jaminan terhadap hak atas tanah; e. Nama-nama dusun; f. Ketentuan peralihan	Triwulan III	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
84	Batas Kalurahan Triwidadi	a. Titik koordinat batas kalurahan; b. Batas kalurahan sesuai arah mata angin; c. Kode Desa; d. Jaminan terhadap hak atas tanah; e. Nama-nama dusun; f. Ketentuan peralihan	Triwulan III	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
85	Batas Kalurahan Argodadi	a. Titik koordinat batas kalurahan; b. Batas kalurahan sesuai arah mata angin; c. Kode Desa; d. Jaminan terhadap hak atas tanah; e. Nama-nama dusun; f. Ketentuan peralihan	Triwulan III	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
86	Batas Kalurahan Argosari	a. Titik koordinat batas kalurahan; b. Batas kalurahan sesuai arah mata angin; c. Kode Desa; d. Jaminan terhadap hak atas tanah; e. Nama-nama dusun; f. Ketentuan peralihan	Triwulan III	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
87	Batas Kalurahan Argorejo	a. Titik koordinat batas kalurahan; b. Batas kalurahan sesuai arah mata angin; c. Kode Desa; d. Jaminan terhadap hak atas tanah; e. Nama-nama dusun; f. Ketentuan peralihan	Triwulan III	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
88	Batas Kalurahan Argomulyo	a. Titik koordinat batas kalurahan; b. Batas kalurahan sesuai arah mata angin; c. Kode Desa; d. Jaminan terhadap hak atas tanah; e. Nama-nama dusun; f. Ketentuan peralihan	Triwulan III	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
89	Batas Kalurahan Bangunjiwo	a. Titik koordinat batas kalurahan; b. Batas kalurahan sesuai arah mata angin; c. Kode Desa; d. Jaminan terhadap hak atas tanah; e. Nama-nama dusun; f. Ketentuan peralihan	Triwulan III	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
90	Batas Kalurahan Tamantirto	a. Titik koordinat batas kalurahan; b. Batas kalurahan sesuai arah mata angin; c. Kode Desa; d. Jaminan terhadap hak atas tanah; e. Nama-nama dusun; f. Ketentuan peralihan	Triwulan III	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
91	Batas Kalurahan Tirtonirmolo	a. Titik koordinat batas kalurahan; b. Batas kalurahan sesuai arah mata angin; c. Kode Desa; d. Jaminan terhadap hak atas tanah; e. Nama-nama dusun; f. Ketentuan peralihan	Triwulan III	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
92	Batas Kalurahan Ngestiharjo	a. Titik koordinat batas kalurahan; b. Batas kalurahan sesuai arah mata angin; c. Kode Desa; d. Jaminan terhadap hak atas tanah; e. Nama-nama dusun; f. Ketentuan peralihan	Triwulan III	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
93	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Anak Putus Sekolah, Anak Tidak Sekolah dan Pemberantasan Buta Aksara	Petunjuk pelaksanaan Perda No 8 Tahun 2024 terutama terkait tata cara pemberian bantuan pembiayaan dan tata cara pemberian penghargaan	Triwulan III	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
94	Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Arsip Statis	Pengelolaan Arsip Statis	Triwulan III	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
95	Pengelolaan Arsip Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul	Pengelolaan Arsip Dinamis	Triwulan III	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
96	Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan	Triwulan III	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
97	Pedoman Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	a. Pedoman Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau b. Kriteria Penerima BLT DBH-CHT c. Mekanisme Penyaluran BLT DBH-CHT	Triwulan III	Dinas Sosial
98	Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024	Menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024	Triwulan III	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
99	Pengendalian Kecurangan	mengatur mengenai maksud dan tujuan, strategi pengendalian kecurangan, lingkungan pengendalian kecurangan, perilaku anti kecurangan, satuan tugas pengendalian kecurangan, dan pembinaan dan pengawasan	Triwulan III	Inspektorat Daerah
100	Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan	Mengatur mengenai jenis Produk Hukum Kalurahan dan tata cara pembentukan Produk Hukum Kalurahan	Triwulan III	Bagian Hukum
101	Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Program Penanganan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2025	Mengatur mengenai sasaran dan mekanisme pencairan dan penyaluran bantuan sosial untuk program penanganan kemiskinan ekstrem	Triwulan III	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
102	Standar Harga Satuan	Pedoman standardisasi harga barang dan jasa dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaksanaan penganggaran bagi Perangkat Daerah yang memuat, antara lain: a. Komponen standar biaya umum; b. komponen standar satuan harga; c. komponen satuan pokok kegiatan; dan d. komponen analisa standar biaya untuk konstruksi dan non konstruksi	Triwulan III	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
103	Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bantul	mengatur mengenai pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan di Kabupaten Bantul	Triwulan III	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
104	Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	a. tindak lanjut penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 b. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Triwulan IV	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
105	Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	a. Pengaturan jenis dan penyusunan naskah dinas b. Penggunaan lambang negara, logo, dan cap dinas c. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar d. Pengurusan naskah dinas korespondensi	Triwulan IV	Bagian Organisasi

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
106	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	a. Indikator Kinerja Utama b. Rencana Strategis c. Rencana Kinerja Tahunan d. Perjanjian Kinerja Tahunan e. Laporan Kerja Instansi Pemerintah	Triwulan IV	Bagian Organisasi
107	Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	a. Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan dari PNS dan PPPK b. Jam kerja orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu	Triwulan IV	Bagian Organisasi
108	Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	a. Prinsip pemberian TPP b. Tujuan pemberian TPP c. Kriteria pemberian TPP d. Penghitungan besaran pemberian TPP e. Sasaran pemberian TPP f. Indikator pemberian TPP g. Pelaksanaan pemberian TPP h. Pendanaan i. Ketentuan peralihan	Triwulan IV	Bagian Organisasi
109	Bantuan Operasional Penunjang Bupati dan Wakil Bupati	Penatausahaan Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Triwulan IV	Bagian Perencanaan Keuangan
110	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat	a. Batasan Kawasan pengaruh pasar rakyat b. Pendirian, pembangunan kembali, pemindahan dan penggabungan pasar rakyat c. Tipe kelas pasar d. Partisipasi masyarakat	Triwulan IV	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan
111	Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul	Mekanisme pemberian kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah berupa bantuan stimulant rumah swadaya	Triwulan IV	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
112	Batas Kalurahan Seloharjo	a. Titik koordinat batas kalurahan; b. Batas kalurahan sesuai arah mata angin; c. Kode Desa; d. Jaminan terhadap hak atas tanah; e. Nama-nama dusun; f. Ketentuan peralihan	Triwulan IV	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
113	Batas Kalurahan Panjangrejo	a. Titik koordinat batas kalurahan; b. Batas kalurahan sesuai arah mata angin; c. Kode Desa; d. Jaminan terhadap hak atas tanah; e. Nama-nama dusun; f. Ketentuan peralihan	Triwulan IV	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
114	Batas Kalurahan Srihardono	a. Titik koordinat batas kalurahan; b. Batas kalurahan sesuai arah mata angin; c. Kode Desa; d. Jaminan terhadap hak atas tanah; e. Nama-nama dusun; f. Ketentuan peralihan	Triwulan IV	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
115	Batas Kalurahan Sidomulyo	a. Titik koordinat batas kalurahan; b. Batas kalurahan sesuai arah mata angin; c. Kode Desa; d. Jaminan terhadap hak atas tanah; e. Nama-nama dusun; f. Ketentuan peralihan	Triwulan IV	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
116	Batas Kalurahan Sumbermulyo	a. Titik koordinat batas kalurahan; b. Batas kalurahan sesuai arah mata angin; c. Kode Desa; d. Jaminan terhadap hak atas tanah; e. Nama-nama dusun; f. Ketentuan peralihan	Triwulan IV	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
117	Batas Kalurahan Mulyodadi	a. Titik koordinat batas kalurahan; b. Batas kalurahan sesuai arah mata angin; c. Kode Desa; d. Jaminan terhadap hak atas tanah; e. Nama-nama dusun; f. Ketentuan peralihan	Triwulan IV	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
118	Batas Kalurahan Parangtritis	a. Titik koordinat batas kalurahan; b. Batas kalurahan sesuai arah mata angin; c. Kode Desa; d. Jaminan terhadap hak atas tanah; e. Nama-nama dusun; f. Ketentuan peralihan	Triwulan IV	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
119	Batas Kalurahan Donotirto	a. Titik koordinat batas kalurahan; b. Batas kalurahan sesuai arah mata angin; c. Kode Desa; d. Jaminan terhadap hak atas tanah; e. Nama-nama dusun; f. Ketentuan peralihan	Triwulan IV	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
120	Batas Kalurahan Tirtomulyo	a. Titik koordinat batas kalurahan; b. Batas kalurahan sesuai arah mata angin; c. Kode Desa; d. Jaminan terhadap hak atas tanah; e. Nama-nama dusun; f. Ketentuan peralihan	Triwulan IV	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
121	Batas Kalurahan Tirtohargo	a. Titik koordinat batas kalurahan; b. Batas kalurahan sesuai arah mata angin; c. Kode Desa; d. Jaminan terhadap hak atas tanah; e. Nama-nama dusun; f. Ketentuan peralihan	Triwulan IV	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
122	Batas Kalurahan Tirtosari	a. Titik koordinat batas kalurahan; b. Batas kalurahan sesuai arah mata angin; c. Kode Desa; d. Jaminan terhadap hak atas tanah; e. Nama-nama dusun; f. Ketentuan peralihan	Triwulan IV	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
123	Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Tahun 2025-2045	a. Tujuan penataan wilayah perencanaan b. Rencana struktur ruang c. Rencana pola ruang d. ketentuan pemanfaatan ruang e. Peraturan zonasi Kelembagaan	Triwulan IV	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
124	Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2026	Pedoman untuk memberikan tunjangan perumahan kepada pimpinan dan anggota DPRD		Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
125	Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2026	pedoman untuk memberikan tunjangan transportasi kepada anggota DPRD		Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
126	Perubahan Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025	Mengakomodir perubahan harga komponen yang ada dalam SHBJ		Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
127	Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan	Menambahkan mekanisme pengajuan permintaan barang persediaan		Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
128	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Penjabaran rencana keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri atas pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan daerah periode tahun anggaran 2025		Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
129	Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Penjabaran rencana keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri atas pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan daerah periode tahun anggaran 2025		Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
130	Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah	mengakomodir pengaturan mengenai Opsen Pajak		Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
131	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Mengatur mengenai maksud dan tujuan, prinsip dasar, ruang lingkup, norma standar prosedur dan kriteria, koordinasi dan harmonisasi, penyebarluasan data, dan pembinaan monitoring dan evaluasi		Dinas Komunikasi dan Informatika
132	Rencana Strategis Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tahun 2025-2029	Mengatur mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum dan kebijakan, ketentuan umum, ruang lingkup, simpul jaringan, kinerja simpul jaringan, sasaran dan arah kebijakan, dan rencana strategis penyelenggaraan informasi geospasial		Dinas Komunikasi dan Informatika
133	Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Mengatur mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum dan kebijakan, ketentuan umum, penyelenggaraan dan pembangunan aplikasi, penatakelolaan, pemantauan dan evaluasi, ketentuan penutup		Dinas Komunikasi dan Informatika
134	Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan	Mengatur Tata cara Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman beralkohol, tata cara Perizinan Penjual Langsung dan/atau Pengecer Minuman Beralkohol, menegaskan Larangan Penjualan ke anak dibawah umur dan penjualan minuman beralkohol secara daring/online, dan mengatur tata cara pemberian sanksi administratif		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan
135	Pembebasan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk Lahan Pertanian	Mengatur mengenai syarat dan mekanisme pemberian pembebasan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan		Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
136	Standar Pelayanan Minimum pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebersihan, Pertamanan dan Persampahan	mengatur mengenai standar pelayanan minimum UPTD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi jenis pelayanan dan indikator pelayanan		Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam
137	Rencana Strategis pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebersihan, Pertamanan dan Persampahan	Mengatur mengenai dokumen rencana strategis dari UPTD yang berisi pendahuluan, gambaran pelayanan UPTD, permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program pengembangan layanan, kinerja penyelenggaraan bidang urusan, dan penutup		Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

